

STUDI DAN ANALISIS PENYELESAIAN ISU-ISU INTOLERANSI KEAGAMAAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2015

Silfia Hanani

LAIN Bukittinggi, Silfia_hanani@yahoo.com

Nofrianti Putri Utami

LAIN Bukittinggi, nofriantiutami27@gmail.com

Diterima: 23 Juli 2019	Direvisi : 19 November 2019	Diterbitkan: 25 Desember 2019
------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Abstract

Religious intolerance in West Sumatra in 2014-2015 experienced an increase which was affected by the rejection of facilities that would be built by investors of different religions with the majority of religious communities. Religious intolerance is an indicator of the low attitude of religious tolerance in society. The phenomenon of racism and theological nuances in Indonesia seems to strengthen the suspicion that religion is the cause of conflict, triggers of violence, and a variety of behaviors that sometimes generate not only hatred, but also hostility, and fierce warfare among humans. However, the case does not cause conflict diversity in this region because of the solutions made for each of these issues. At this time, religious themes have been developed by the community, where people are not easy to accept the religion of Islam that has just been developed by the stranded Arabian sword. After Islam became the official religion of the Minangkabau people in West Sumatra, in general, in West Sumatra, the issue of faith became the part that received attention; the effect of religion meant how to respond to the arrival or emergence of movements outside of the majority religion. This paper describes the solutions made to reduce these issues so as not to cause religious conflict.

Keywords: Tolerance, Religious Intolerance, Religious Conflict.

Abstrak

Intoleransi beragama di Sumatera Barat pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh penolakan-penolakan fasilitas yang akan dibangun oleh investor yang berbeda agama dengan mayoritas agama masyarakat. Intoleransi beragama ini sebagai indikator rendahnya sikap toleransi beragama masyarakat. Fenomena intoleransi dan konflik bernuansa agama di Indonesia seakan menguatkan kecurigaan bahwa agama sebagai penyebab konflik, pemicu tindak kekerasan, dan beragam perilaku yang terkadang bukan sekadar melahirkan kebencian, tapi juga permusuhan, dan peperangan dahsyat di antara sesama manusia Walaupun demikian, kasus tersebut tidak menimbulkan konflik keberagamaan di wilayah ini, karena adanya solusi yang dilakukan untuk setiap adanya isu-isu tersebut. Pada masa ini sudah isu-isu agama sudah dibangun oleh masyarakat, dimana masyarakat tidak mudah menerima agama Islam yang baru saja dikembangkan oleh pedang Arab yang terdampar itu. Setelah Islam menjadi agama resmi masyarakat Minangkabau di Sumbar, maka pada umumnya di Sumatera Barat isu agama menjadi bahagian yang mendapatkan perhatian, isu agama artinya adalah bagaimana respon yang muncul terhadap kedatangan atau munculnya gerakan diluar dari agama mayoritas. Tulisan ini, menjelaskan tentang solusi-solusi yang dilakukan untuk meredam isu-isu tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik keagamaan tersebut.

Kata Kunci: Toleransi, Intoleransi Keagamaan, Konflik Keagamaan.

PENDAHULUAN

Minangkabau pada mulanya didatangi oleh seorang pedagang Arab dengan cara tidak sengaja, mereka terdampar di sebuah selat di Pantai Pariaman pada tahun 580H/1184-1185 M. Semula pedagang ini hendak melanjutkan perdangangannya ke Timur, namun terdampar di Pulau Perca nama dari wilayah ini dahulunya. Pedagang Arab ini kemudian diselamatkan oleh orang kampung dan tinggal bersama dengan orang kampung kemudian menikah dengan anak kepala nagari. Pedagang Arab ini bernama Saidi Abdullah. Saidi Abdullah memperkenalkan Islam ke orang yang menyelamatkannya yang pada saat itu beragama Budha dan Hindu¹

Pada masa ini sudah isu-isu agama sudah dibangun oleh masyarakat, dimana masyarakat tidak mudah menerima agama Islam yang baru saja dikembangkan oleh pedagang Arab yang terdampar itu. Pada saat itu agama Budha dan Hindu masih kuat dan mayoritas dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Elite-elite adat dan agama ketika itu tidak mudah menerima ajaran yang diperkenalkan oleh pedagang Arab yang terdampar ini. Tidak menerima ajaran baru yang didengar oleh masyarakat setempat. Fenomena intoleransi dan konflik bernuansa agama di Indonesia seakan menguatkan kecurigaan bahwa agama sebagai penyebab konflik, pemicu tindak kekerasan, dan beragam perilaku yang terkadang bukan sekadar melahirkan kebencian, tapi juga permusuhan, dan peperangan dahsyat di antara sesama manusia.²

Isu-isu agama ketika itu sudah terlihat, bagaimana elite adat menentang kedatangan agama yang dikembangkan oleh pedagang Arab. Ketika itu orang kampung sudah

nyaman dengan agama nenek moyangnya, mereka sudah nyaman dengan praktek-praktek agama yang diterima oleh nenek moyangnya. Untuk itu, pengembangan agama Islam oleh pedagang Arab tersebut tidak mudah dilakukannya tetapi melalui proses yang panjang melalui pendekatan-pendekatan elit adat bahkan melalui pernikahan. Setelah itu baru dilakukan pengenalan terhadap agama Islam di wilayah bernama Pulau Perca ini, sebelum bernama Minangkabau. Elite ada ketika itu beragama Budha-Hindu tidak mudah menerima begitu saja ajaran-ajaran baru yang datang ketengah-tengah mereka. Pada tahap awal ini kedatangan Islam tidak berhasil menjadi agama baru bagi masyarakat, sehingga sepeninggal Saidi Abdullah praktek-praktek Hindu dan Budha itu berkembang kembali dan praktek agama Islam memudar³

Cukup lama terjadi kekosongan Islam di Pulau Perca atau Minangkabau ini, baru pada tahun 1037H/1627-1628M datang lagi seorang ulama dari Madinah yang hendak mengembangkan Islam ke Gujarat di India namun diperjalanan kapalnya karam pula, akhirnya terdampar sampai di Nagari Tiku. Menurut catatan Amin ulama itu bernama Abdullah Arif masyarakat di Pantai Barat Pariaman menyebutnya dengan *Ungku Madinah*. Abdullah Arif tersebut membawa sebuah kitab dari gurunya nama kitab itu adalah *Taupah*, kitab ini menjadi pegangan tarikat Syatariah Burhanuddin.⁴

Dari Pantai Tiku ulama ini berjalan hingga bertemu sebuah perkampungan yang sekarang bernama Tapakis. Di daerah ini ulama itu dibantu oleh masyarakat sehingga bisa menetap dan tinggal bersama dengan penduduk, bahkan masyarakat membantu mendirikan tempat tinggal untuknya, kemudian tempat tinggalnya ini dikenal dengan *surau*. Tempat tinggal ulama ini kemudian diabadikan sampai sekarang dengan nama

¹ Imam Maulana Abdul Munaf Al-Amin, *Mubalighul Islam*, (Padang: Bagian Urusan Kebudayaan Sumatera Barat, 1883), 57

² Enjang Muhaemin, and Irfan Sanusi, "Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas" *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.1 (2019), 19

³ Imam Maulana Abdul Munaf Al-Amin, *Mubalighul Islam*, 58

⁴ *Ibid.*, 61

Surau Madinah karena Abdullah Arif itu berasal dari Madinah dan dijuluki oleh masyarakat setempat pada waktu itu dengan Ungku Madinah.

Pada masa priode ke dua ini, isu agama kembali menjadi bahagian penting dikalangan masyarakat Minangkabau yang sudah terbiasa dan mendalam dengan ajaran Budha dan Hindu tersebut. Perlawanan-perlawanan elite juga berdatangan, namun dapat diatasi oleh Ungku Madinah itu, karena dia mengembangkan Islam dengan pendekatan-pendekatan elit dan mendirikan *basis* pendidikan agama Islam itu sendiri melalui lembaga *surau* sehingga lama kelamaan isu agama bisa redam dan bahkan Ungku Madinah mendapatkan tempat di dalam masyarakat sehingga Islam berkembang serta diterima menjadi gama baru dalam masyarakat Minangkabau.

Pada tahap Islam kedua ini, isu-isu agama sudah mulai tidak menjadi perhatian dikalangan masyarakat Minangkabau, sehingga Islam dapat berkembang dan diterima menjadi salah satu bahagian ajaran agama di kalangan masyarakat Minangkabau ketika itu. Bahkan agama Islam sudah berkembang di sepanjang pesisir Pariaman itu, tidak hanya di Tiku saja tetapi juga sudah berkembang ke Tanjung Medan dan wilayah-wilayah sekitarnya.

Akhirnya Burhanuddin berguru kepada Abdurrauf Singkel selama 30 tahun dan kemudian pulang ke Minangkabau pada tahun 1070H/1660M. Burhanuddin memilih pulang ke pesisir pantai Pariaman yang dekat dengan tempat surau Ungku Madinah. Burhanuddin menempati kampung Tanjung Medan, di daerah ini masyarakat memberinya sebuah surau sebagai tempat tinggal dan mengajarkan mengaji.

Surau Burhanuddin kemudian berkembang dan banyak didatangi oleh anak muda dari berbagai daerah, sehingga Islam semakin mengakar di daerah pesisir di Minangkabau. Murid-murid Burhanuddin yang datang dari beberapa daerah ini kemudian

pulang ke kampung halamannya mendirikan surau pula sebagai tempat untuk mengembangkan ilmunya, sehingga ketika itu seorang ulama pasti memiliki surau untuk menjalankan perannya sebagai guru dari umat elite agama di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi yang demikian Islam cepat berkembang dan diterima oleh masyarakat di daerah ini.

Perkembangan yang demikian itu bukan berarti tidak mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok mayoritas beragama Budha-Hindu ketika itu, malahan juga dari kalangan elite-elite adat dan para tokoh-tokoh mistik ketika itu. Amin menceritakan kedatangan Islam di wilayah Pariaman ketika itu dapat tantangan besar daripada elit adat di Pariaman, terutama dikalangan “mistikus” yang berempat, yakni tokoh-tokoh yang ditakuti oleh masyarakat karena kekuatan mistik yang dimilikinya, orang yang berempat ini adalah, Kalit-Kalit Jantan, Gagar Tangan Padang, Sijan Panas dan Siwan. Dari segi nama saja mereka sangat menakutkan apalagi dengan tindakannya. Orang kampung takut kepadanya karena mistik yang dimilikinya.⁵

Walaupun Islam mendapat perlawanan-perlawanan ketika itu, isu-isu agama menjadi sebagai sumber konflik pada masa itu namun Islam sebagai agama minoritas secara berlahan-lahan bisa diterima dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Minangkabau. Akhirnya menjadi agama mayoritas yang dideklerasikan di dalam sebuah pertemuan antara orang adat dan agama di Bukit Marapalam pada tahun 1668M. Deklerasi itu menghasilkan statemen *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullak*.

Islam menjadi agama mayoritas, sehingga pusat kerajaan Pagariyung mengukuti aturan mayoritas ini sebagaimana dapat dilihat dari perubahan struktur pemerintahan di pusat kerajaan. Lahirnya dua raja pembantu yakni raja adat dan ibadat, kemudian Raja alam

⁵ Ibid., 77

Minangkabau ketika itu Sutan Alif memeluk agama Islam. Kondisi ini menjadikan Islam menggantikan agama mayoritas Budha-Hindu ketika itu.

Namun, pengamalan Islam masyarakat belum pernah selesai praktik-praktik masa lalu masih saja terjadi dan diamalkan. Praktik-praktik lokal ini kemudian secara radikal ditumpas oleh kedatangan gerakan Wahabi yang berkembang di dunia Islam dan gerakan itu dibawa ke Minangkabau oleh tiga orang haji pada tahun 1802, tiga haji itu adalah Haji Miskin dari Pandai Sikat (Luhak Agam), Haji Abdur Rahman dari Piabang (Luhak Lima Puluh) dan Haji Muhammad Arief dari Sumanik (Luhak Tanah Datar). Kemudian gerakan tiga haji ini dibantu oleh orang-orang yang terpengaruh dari tiga haji ini, jumlah mereka delapan orang makanya mereka disebut dengan harimau nan salapan. Delapan orang yang bergabung dengan gerakan itu adalah, Tuanku Nan Renceh di Kamang, Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Koto di Padang Luar, Tuanku di Galung, Tuanku di Koto Ambalau dan Tuanku di Lubuk Aur.

Kelompok ini melakukan radikalisme dalam menyebarkan dan membersihkan praktik-praktik budaya lokal dikalangan masyarakat Minangkabau pada masa itu, bahkan mereka tidak segan-segan melakukan pembunuhan atau pembakaran, gerakan pemurnian. Gerakan Wahabi ini melahirkan gerakan Paderi yang kemudian berorientasi melawan ketidakadilan dan kesemena-menaan kolonial Belanda. Gerakan Paderi ini kemudian dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol.⁶

Pada dasarnya, isu-isu agama itu dalam masyarakat yang berinteraksi dengan dunia luar ternyata sudah menjadi catatan-catatan sejarah tersendiri. Di Minangkabau yang kemudian menjadi sebahagian besar mendiami daerah wilayah administrasi

Sumatera Barat, isu agama itu sudah berkembang semenjak Islam datang secara tidak sengaja ke daerah ini. Isu-isu agama itu dilatar belakangi oleh isu mayoritas dan minoritas kemudian bergeser pada isu pemurnian yang bergerak secara radikal. Agaknya, isu pemurnian ini memberikan kesan dan lebih mempertegas isu agama itu bahagian yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang Minangkabau yang di Sumatera Barat ini.

Dari catatan sejarah ini, maka dapat pula dilihat bahwa isu-isu agama ada yang berkontribusi terhadap konflik yang mengacu kepada pertumpahan darah atau kekerasan yang menelan korban material dan nyawa. Dari perkembangan dan proses interaksi agama di daerah ini maka dapat dijelaskan isu-isu agama yang pernah berkembang di daerah ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Bentuk Isu Agama Di Minangkabau Sebahagian Besar di Sumatera Barat

Priode	Bentuk Isu Agama		Bentuk Gerakan	Tokoh
	Mayoritas	Minorias		
Awal 1184/1185	Budha-Hindu	Islam	Penolakan	Adat dan Mistikus
Kedua 1627/1628	Budha-Hindu	Islam	Penolakan	Adat dan Mistikus
Ketiga 1660	Budha-Hindu	Islam	Konflik	Adat-Mistikus dan elite agama
Ketiga Era Wahabi ah 1802	Islam Lokalitas	Islam Pemurnian	Pemurnian	Pemeluk agama dan Tokoh Wahabiah
Paderi 1821-1837	Islam	Penolakan Kolinali	Perang	Imam Bonjol

Sumber: Diolah dari beberapa literature

Setelah Islam menjadi agama resmi masyarakat Minangkabau di Sumbang, maka pada umumnya di Sumatera Barat isu agama menjadi bahagian yang mendapatkan perhatian, isu agama artinya adalah bagaimana respon yang muncul terhadap kedatangan atau munculnya gerakan diluar dari agama

⁶ Djokusurjo, dkk., *Agama dan Perubahan Sosial, Studi Antara Hubungan Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), 171.

mayoritas. Penduduk Sumatera Barat yang dominan beretnis Minangkabau dan beragama totalitas Islam, maka penerimaan terhadap gerakan diluar dari Islam sangat sensitif, bahkan bisa berujung dengan konflik, minimal dalam bentuk intoleransi beragama dengan bentuk penolakan-penilaian terhadap simbol dan kehadiran proyek pengembangan yang dilakukan oleh umat beragam selain dari Islam.

Isu kristenisasi mendominasi jika dibandingkan dengan isu-isu agama lainnya. Tentu hal ini tidak terlepas daripada jumlah penganut agama ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penganut agama lainnya selain daripada Islam dan tersebar diseluruh wilayah kota dan kabupaten. Data jumlah penganut agama ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Sumatera Barat Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	4.721.924
2	Kristen	69.253
3	Khatolik	40.428
4	Hindu	234
5	Budha	3.419
6	Konghucu	70
7	Lain-lain	11.581
Jumlah		4.846.908

Sumber BPS Sumbar 2010

Dari data di atas dapat diketahui, bahwa diantara umat beragam selain dari pada Islam di Sumatera Barat agama Nasrani paling banyak dibandingkan dengan yang lain. Keberadaan penganut agama ini tersebar diberbagai wilayah kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat, sebagaimana dapat dilihat dari table berikut ini:

Dari 7 Kota dan 12 Kabupaten di Sumatera Barat, ternyata jumlah beragama Nasrani (Khatolik dan Protestan) banyak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di Kabupaten ini Islam dan agama selain daripada beragama Nasrani. Dilihat dari jumlah ini ternyata agama ini juga melakukan gerakan-gerakan atas nama keagamaan yang lebih banyak pula dibandingkan dengan agama yang

lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ini sering menjadi isu keagamaan. Berbeda dengan agama-agama yang jumlahnya sedikit, sering tidak menimbulkan isu karena tidak banyak melakukan kegiatan keagamaan. Misalnya kelompok penganut agama Konghucu misalnya, tidak banyak melahirkan isu keagamaan.

Kelompok Konghucu menjadikan bahasa lokal sebagai media untuk bernegosiasi dengan masyarakat dimana keberadaannya. Dengan kelompok agama ini, kelompok-kelompok agama mayoritas tidak banyak menimbulkan isu keagamaan, tetapi isunya terkait dengan isu ekonomi karena kelompok ini pada umumnya memegang kekuatan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat lokal.

Isu agama biasanya menyebabkan ada yang terusik oleh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing agama, baik yang dilakukan oleh kelompok minoritas maupun oleh kelompok mayoritas. Di Sumatera Barat Isu-isu keagamaan itu berkembang tiga tahun ini adalah isu antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas Nasrani (Kristen Khatolik-Protestan), isus-isunya terkait dengan;

Murtad

Isu permutadatan ini, dilator belakangi oleh kenyataan ditemukan adanya permutadatan dikalangan orang Minang, kemudian isu ini menjadi isu yang terus menerus dikembangkan dan dihembuskan sebagai bentuk perlawanan-perlawanan atas pemrtadan yang sudah terjadi.

Murtad adalah isu agama yang menjadi isu kebencian bagi kalangan mayoritas yang pindah ke agama minoritas. Berpindahnya agama seorang bersuku Minangkabau ke agama lain menjadi preseden buruk dikalangan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, isu ini bisa menjadi kebencian yang luar biasa bahkan orang melakukan pindah agama itu bisa mendapatkan hokum adat yang berimbas

pada kaum dan tidak hanya pada diri orang yang murtad ini.

Isu agama yang terkait dengan murtad belakangan ini di sosia media sangat hangat didiskusikan, mulai dari tanggapan humanis sampai pada tanggapan yang sangat radikal. Dari beberapa catatan yang dipublikasi di situs-situs pribadi dan sampai pada jejering sosial, ditemukan kasus pindah agama dilakukan dikalangan orang Minang, bahkan ada yang sudah menjadi pendeta. Kasus ini menjadi isu agama yang selalu menjadi hangat dibicarakan dan bahkan menjadi *trending hot* selalu di media sosial. Menjadi isus dan topic yang tidak pernah pudar apalagi kalau terjadi geliat-geliat gerakan keagamaan, selalu menjadi kata kunci dipermurtadan ini. Berkali-kali di berbagai situs dimunculkan kembali, rang-orang Minang yang murtad tersebut.

Isu-isu pemurtadan atau lebih dominan dikaitkan dengan isu kristenisasi merupakan isus agama yang merupakan isu yang selalu bermunculan, isu ini menjadi isu yang dilatar belakangi oleh factor sejarah dan factor gerakan-gerakan keagamaan. Faktor sejarah misalnya, ada trauma sejarah yang terjadi misalnya dari kasus pindah agama orang Minang kemudian menjadi pendeta. Realitas ini menjadi fakta yang selalu lekat dalam ingatan masyarakat Minangkabau. Akibat dari itu, ketakutan-ketakutan terhadap keterulangan sejarah ini menjadi hal yang selalu diingatkan dengan cara-cara demikian.

Penyebaran Ajaran Agama

Selain daripada isu pemuatan, ditemukan juga adanya isu penyebaran ajaran agama ke dalam kelompok beragama, terutama kedalam kelompok mayoritas Minangkabau yang beragama Islam. Penyebaran agama bisa dilakukan melalui kegiatan kegiatan keagamaan dan bisa pula dengan strategi yang bisa meyakinkan orang lain. Beberapa yang dilakukan dalam penyebaran agama ini diantaranya adalah;

Tabel 3
Cara Penyebaran Agama Yang Menjadi Isu Keagamaan

No	Bentuk Kegiatan	Isu-Isu
1	Translasi Kitab Suci Ke dalam Bahasa Lokal-Minang	Pemeluk agama nasrani, mentraslet Injil ke dalam bahasa Minang kemudian beredar ke di tengah-tengah masyarakat
2	Pemakaian symbol-symbol lokalitas	Perayaan Agama atau ketika dilakukan dalam peribadatan
3	Dakwah-Penyebaran agama	Melakukan pengajaran agama secara diam-diam atau terang-terangan pada orang yang sudah beragama/ bahkan ada dalam bentuk pemberian material pada seseorang atau kelompok orang supaya mereka pindah dalam ajaran agama pemberi.
4	Pendirian rumah ibadah	Pendirian rumah ibadah selain rumah ibadah Islam di Sumatera Barat sering menjadi isu agama.
5	Hiburan	Film Cinta Tapi Beda, pertunjukan seperti memakai pakaian Adat Minang ketika ada kebaktian dll.

Penyebaran agama, merupakan suatu keharusan tetapi penyebaran agama yang dilakukan kepada kelompok masyarakat yang sudah beragama baik itu dilakukan oleh kelompok mayoritas maupun minoritas, maka hal ini akan menjadi isu keagamaan. Untuk menghindari hal ini menjadi isu agama, pemerintah pun telah mengeluarkan misalnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dan pada tahun 2015

sudah diajukan pula Rancangan Undang-Undang Tentang Kerukunan Umat Beragama.

Pendirian Fasilitas

Menjadi isu agama lagi di Sumatera Barat adalah isu pendirian fasilitas umum yang dibangun oleh pihak agama minoritas. Hal ini sempat mendapat perlawanan melalui demonstrasi dan penolakan dari kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya terlihat dari penolakan terhadap dibangunnya fasilitas rumah sakit Siloam oleh Lippo Group di Padang, karena Lippo Group merupakan perusahaan yang dikuasi oleh pengaut Nasrani tersebut jadi kehadiran Rumah Sakit tersebut dicurigai sebagai bentuk dari kekuasaan agama Nasrani jika berdiri di kota Padang.

Kehadiran rumah sakit ini mendapat reaksi yang keras, pada hal pemancangan tiangnya sudah dilakukan pada tanggal 10 Mei 2013 dan dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah. Namun, akhirnya mendapat tantangan yang luar biasa dari masyarakat Sumatera Barat dan disertai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh beberapa petinggi ormas-ormas Islam bahkan oleh calon anggota legislatif yang akan bertanding menghadapi pemilu 2014. Hal ini pun sebagai kesempatan pula oleh calon-calon legislatif untuk menarik simpatisan dengan mengikuti alur psikologis masyarakat.

Selama beberapa hari masa turun kejalan menolak kehadiran Rumah Sakit Siloam tersebut dengan menyuaran berbagai yel-yel, termasuk yek anti kristenisasi. Jadi pembangunan atas sponsor-sponsor dan lebel agama selain dari agama mayoritas di Sumbar berpotensi menjadi isu agama.

RESPON TERHADAP ISU AGAMA

Respon merupakan perasaan, aktivitas, perbuatan atau perkataan yang muncul dalam menentang atau menanggapi atas munculnya isu-isu agama yang muncul di Sumatera Barat. Respon tersebut tidak hanya terlihat dari gerakan realitas tetapi juga dilakukan melalui

ide dalam bentuk tulisan-tulisan. Di Sumatera Barat respon-respon itu, muncul dalam bentuk sikap dan penolakan yang disampaikan dalam pembicaraan atau dalam bentuk tulisan atau pernyataan.

Respon ini pada umumnya biasanya berbentuk penolakan atau perlawanan, karena biasanya isu agama sesuatu yang dianggap berbeda dengan kehendak mayoritas. Respon juga bisa dimaknai sebagai bentuk daripada perlawanan-perlawanan baik secara radikal maupun secara ide. Namun, isu agama di tengah-tengah mayoritas adalah berbentuk penolakan ketidak lumrahan yang dialami oleh mayoritas terhadap isu agama minoritas. Beberapa bentuk respon yang muncul terkait dengan isu agama diantaranya adalah;

Demontarasi

Penolakan melalui demonstrasi, selama tahun 2012-2014 paling tinggi dan sering dilakukan adalah terlihat pada saat adanya penolakan terhadap pendirian rumah sakit Siloam di kota Padang. Beberapa elemen masyarakat bergabung turun ke jalan dan menyuaran penolakan dan anti terhadap pendirian rumah sakit yang dicurigai sebagai bentuk proses kristenisasi di Sumatera Barat. Penolakan ini, berupa bentuk ketidaknyamanan masyarakat mayoritas dengan kehadiran fasilitas-fasilitas yang dibangun dengan kepunyaan bahkan embel-embel agama selain dari agama mayoritas masyarakat.

Dalam beberapa kali demonstrasi yang dilakukan dalam penolakan pendirian rumah sakit Siloam tersebut, terlihat ada penolakan terang-terangan dan sekligus menyebut dengan terang-terangan bahwa proyek tersebut adalah proyek kristenisasi. Elemen-elemen yang menamakan atas nama masyarakat Minangkabau tersebut menuntut supaya proyek rumah sakit itu dihentikan dan tidak dibenarkan berdiri di Sumatera Barat. Malahan ada statemen yang menyatakan bagi siapa yang tidak mendukung gerakan pencegahan berdirinya mega proyek siloam tersebut

dianggap memberikan kemandirian bagi Sumatera Barat, ungkapan ini misalnya diungkapkan oleh ketua ormas Paga Nagari Ibnu Agil D Ghani⁷

Pada tahun 2013 dua isu itu menjadi perhatian khusus dan paling banyak mendapat respon masyarakat dan dilakukan dengan penolakan demonstrasi oleh kalangan masyarakat yang bergabung dengan elemen-elemen dan ormas-ormasi Islam. Sedangkan dilain pihak ada keberadaan-keberadaan lain tidak mendapat perhatian penolakan seperti dua hal ini. Menurut catatan Noobaini pada hal masih banyak ajaran-ajaran dan aliran-aliran keagamaan yang berkembang di Sumbar sampai tahun 2012, namun hal itu tidak banyak diketahui dan bahkan penentangannya tidak sekuat dengan masalah kristenisasi seperti di atas.⁸

Isu agama dengan Kristenisasi nampaknya lebih diperhatikan dari pada isu-isu agama yang lainnya, sementara isu-isu tentang aliran dan agama yang lainnya bahkan sampai tahun 2012 masih berkembang di Sumatera Barat namun tidak mendapat tantangan seperti yang dilakukan untuk isu kristenisasi. Ada beberapa hal yang kondisi yang demikian itu terjadi sehingga isu kristenisasi menjadi musuh yang harus diberantas, (1) dari segi pergerakan diantara gerakan agama-agama lainnya gerakan kristenisasi sangat cepat dan terlihat langsung dalam realitas sedangkan isu aliran dan agama lain tidak bergiti membangun efek realitas yang luas. (2) Dari segi jumlah pengikut agama ini dibandingkan dari aliran-aliran dan agama yang lainnya jumlahnya cukup signifikan setelah jumlah penganut Islam di Sumatera Barat, jadi ada rasa psikologis bagi kelompok mayoritas gerakan agama ini akan menindih keberadaan mayoritas dengan ajaran dan teologis yang sudah mengakar.

Sloganisasi dan Antiisasi

Bentuk-bentuk penolakan terhadap isu agama yang lain lagi adalah, melalui slogan-slogan yang disampaikan oleh elite-elite atau kelompok ormas-ormas dalam berbagai kesempatan. Slogan-slogan itu baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk ungkapan yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, sehingga isu-isu agama terutama tentang isu kristenisasi harus ditangkal dan tidak boleh diberi ruang gerak.

Diskusi-diskusi dan slogan-slogan anti dan tolak kristenisasi ini sangat populer dan bahkan meningkat intensitas pada saat akan dididirkannya Rumah Sakit Siloam di Padang. Namun, setelah tujuan tercapai diskusi-diskusi dan sloganisasi dan antiisasi seperti itu hilang dan tidak ditemukan lagi. Namun, ketika menghadapi Pilkada 2015 ini, permasalahan itu dijadikan isu. Terutama isu untuk menohon daripada salah satu calon pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar yang ketika itu disebut-sebut sebagai pemberi izin kehadiran rumah sakit yang diisukan sebagai proyek kristenisasi tersebut.

Penolakan juga pernah dilakukan melalui keputusan, seperti yang terjadi di Payakumbuh penolakan terhadap berdirinya rumah ibadah Vihara, penolakan ini sebagaimana dikemukakan di media yang sama dengan situs di atas, dengan ungkapan statemen sebagai berikut “protes keras dari warga kelurahan Nunang kecamatan Payakumbuh Barat atas adanya rencana pembangunan Vihara Budha Metta di kawasan jalan Luhak Limapuluh Kota. Surat keberatan dan pernyataan sikap penolakan dengan nomor 01/LPM/NN-PBR/II-2012 tertanggal 2 Februari 2012 yang dialamatkan ke walikota dan DPRD Payakumbuh oleh lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan Lunang yang juga ditanda tangani oleh ketua RT, tokoh masyarakat dan beberapa lainnya. Akibatnya, rencana pembangunan Vihara Budha Metta di kawasan itupun gagal. Pemerintah setempat juga menghentikan

⁷ New Tribun, Survei Elsam Kebebasan Beragama di Sumatera Barat Terburuk, 4 Juni 2013.

⁸ Silfia Hanani, *Mengali Interelasi Sosiologi dengan Agama*, (Bandung: Humaniora, 2012), 34

sementara waktu rencana tersebut dengan berbagai alasan”

Namun, belakangan pada tanggal 22 November 2015 di Padang digelar Parade Salib, dengan berkeliling disekitar Kota Padang, namun parade ini tidak mendapat kecaman seperti kecaman kehadiran rumah sakit Siloam. Hanya muncul beberapa stateman saja dengan nada yang mengecam, seperti bunyi kecamannya “Kahadiran Parade Salib di Padang, Menciderai Adai Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah pernyataan ini salah satunya dikemukakan oleh Maad Achin Ketua Umum Gerakan Muslimin Minangkabau sebagaimana diberitakan di media Minangkabau News tanggal 27 November 2015.

Respon negatif dan penolakan terhadap kegiatan ini ternyata hampir tiada, bahkan MUI pun tidak memberikan komentar atau statemen. Dari realitas ini dapat diperoleh bahwa masyarakat Minang, memiliki tradisi kultural ada masa seperti dicerminkan oleh pepatah *sakali suruik, sakali malangkab* artinya ada negosiasi yang dibangun. Mungkin hal ini tidak mendapatkan pertentangan yang luas, karena kegiatan ini sifatnya tidak permanen dan bahagian dari ritual agama yang tidak mempunyai imbas yang jauh terhadap ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan keberadaan siloam mempunyai imbas yang komplek dari segi ekonomi dikuatirkan akan mematikan atau meminggirkan ekonomi lokal, sosial akan berdampak pada citra luas terhadap kekalahan budaya Minang yang penuh dengan simbolisasi Islam dan seterusnya.

BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN ISU KEAGAMAAN

Isu-isu keagamaan di Sumatera Barat pada prinsipnya muncul dari tanggapan mayoritas terhadap minoritas. Mayoritas, mempunyai tream yang sudah mengakar dalam perpspektif sejarah dan berusaha menjaga tream itu dengan sikap eksklusifisme. Tidak bisa menerima secara utuh, baik secara

psikologis maupun secara sisologis idiologis minoritas yang bertentangan dengan teologis mayoritas. Apalagi tream minoritas itu, dibuka dalam isu global seperti isu kriterisasi dengan sepak terjanganya dalam penyebaran agama yang dibungkus dengan berbagai isu-isu, maka hal ini menjadi satu dampak psikologis yang membuat mayoritas Minangkabau dapat menerima isu-isu kristenisasi tersebut.

Namun, isu-isu tersebut masih banyak diselesaikan dalam bentuk inverstigasi-investegasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang terlobat dengan proses harmonisasi, seperti investigasi yang dilakukan oleh LBH padang dan Komnas HAM. Investigasi ini tidak melahirkan bentuk penyelesaian-penyelesaian yang signifikan sehingga yang terjadi adalah konflik “imanjiner”. Konflik ini secara frontal tidak wujud tetapi secara psikologis atau *silent conflict* terlihat.

Silent Conflict bisa berlanjut dalam bentuk tindakan-tindakan, baik maupun dalam bentuk tindakan yang memicu lahirnya disharmonis. Misalnya, munculnya penolakan-penolakan terhadap kehadiran rumah ibadah, kehadiran pemakaman selain daripada kelompok mayoritas. Penolakan-penolakan ini muncul secara terus menerus karena *silent conflict* ini tidak selesai sampai pada akar permasalahannya.

Penyelesaian yang dilakukan tentang isu-isu keagamaan di Sumatera Barat mulai dari bentuk radikalisme sampai pada negosiasi. Radikalisme dapat dilihat dari proses penyelesaian seseorang bersuku Minangkabau di buang sepanjang adat dan diusir dari kampung halaman karena pindah agama dari agama Islam kepada agama selain dari pada Islam. Peristiwa ini dapat dilihat dari pembuangan sepanjang adat yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Yunuardi Koto di Lubuk Basung. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai organisasi tertinggi di Lubuk Basung sudah menyatakan Yanuardi Koto bukan lagi orang

kampung halaman di daerah tersebut, karena yang bersangkutan pindah agama kepada agama yang lainnya, bahkan sekarang yang bersangkutan menjadi pendeta dalam agama Nasrani.

Di buang sepanjang adat artinya adalah tidak lagi diakui sebagai orang yang memiliki suku Minangkabau. Harus keluar dari suku tersebut, bahkan Yanuardi Koto harus meninggalkan nama Koto di belakang namanya, karena Koto itu merupakan salah satu suku dalam masyarakat Minangkabau. Jika dibuang sepanjang adat maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan ke kampung halaman, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan harta pusaka, gelar adat bahkan untuk menetap di kampung halaman.

Negosiasi dan mediasi juga sering dilakukan untuk menyelesaikan isu dan konflik agama, misalnya adanya pelarangan terhadap pendirian rumah ibadah pada satu kawasan maka untuk menjembatani hal ini pemerintah harus melakukan negosiasi, pemerintah harus menjadi mediasi dengan mencari solusi sehingga konflik beragama tersebut tidak menjadi konflik horizontal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus dimana tidak diperbolehkannya berdirinya rumah ibadah non Islam oleh masyarakat pemerintah memediasi dimana masyarakat yang tidak memiliki rumah ibadah itu memfasilirasinya untuk pergi beribadah rumah ibadah yang terdekat dengan lokasi keberadaannya. Misalnya, orang Tanah Datar difasilitasi beribadah keluar daerah atau didatangkan pendeta dengan dipinjamkan gedung tertentu. Hal serupa juga dapat dilihat dari warga Kristen dari semua aliran tinggal dikawasan Muaro Sijunjung. Karena tidak ada fasilitas rumah ibadah, jika mereka hendak melakukan kegiatan keagamaan maka harus pergi ke daerah Sawahlunto dengan jarak kurang lebih 25 Km. Selanjutnya dari beberapa pernyataan Firdaus Kasubag Pelayanan Pengaduan Komnas Ham Padang menyatakan, bahkan dalam beberapa konflik keagamaan pemerintah di Sumatera

Barat juga tidak bisa berbuat banyak karena isu agama di Sumatera Barat sangat sensitif. Bahkan di lembaga pemerintah pun terjadi penolakan-penolakan jika ada pemimpin dari lembaga itu beragama selain daripada Islam seperti yang terjadi di salah satu Kejaksaan dimana seorang jaksa dipindah tugaskan ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk posisi sebagai kepala bagian ditolak keras oleh masyarakat karena ia diketahui bukan berasal dari agama mayoritas.

Bentuk penyelesaian selanjutnya adalah, toleransi dalam memahami mayoritas dari minoritas di ruang publik. Di Ruang publik minoritas dan mayoritas dapat Nampak bersatu, karena adanya pemahaman dari masing-masing tersebut, misalnya dengan adanya aturan-aturan di sekolah di Sumatera Barat pakai jilbab maka untuk merasakan dan mendapatkan rasa aman, maka minoritas mengikuti atribut pakain mayoritas tersebut. Perlindungan rasa aman seperti ini pada dasarnya juga sudah dibuktikan oleh masyarakat etnis China di Sumatera Barat. Etnis ini sebagai kelompok minoritas bisa mengendalikan egosentrisme dengan melakukan pengayatan ke publik setidaknya dapat dilihat daripada bahasa yang digunakannya, tidak eksklusif tetapi inklusif bisa berbahasa masyarakat mayoritas. Bahasa tersebut akhirnya menjadikan mereka secara psikologis menjadi bahagian dari mayoritas, bisa akrab dan diterima⁹

Penyelesaian-penyelesaian isu agama juga dilakukan dengan dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama baru bisa difasilirasi oleh pihak-pihak yang terkait, seperti Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB). Dialog yang melibatkan elite-elite dari masing-masing agama. Seperti pernah dilakukan diakhir tahun 2014 dimana

⁹ Silfia Hanani, "Model Konstruksi Toleransi Antar Umat Beragama Pemeluk Agama Mayoritas dan Minoritas Pada Masyarakat Perkotaan Kota Padang Panjang Di Sumatera Barat". (Salatiga: Renai Percik, 2011), 156-167.

semua lintas agama yang terangkum berdialog dalam menyelesaikan dan mengatasi isu dan konflik agama yang terjadi di Sumatera Barat. Namun ketika itu, lebih banyak membuat antisipatif terhadap pelaksanaan pemilu supaya tidak ditunggangi dengan isu agama.

Dialog pada dasar membuat kesehapan dalam membangun keharmonian antara umat beragama sehingga isu-isu agama yang muncul tidak mengusik kehidupan bersama. Namun, jika dilihat dari kasus 2013 tentang penolakan terhadap kehadiran Rumah Sakit Siloam merupakan sebuah kahrusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan kegiatan tersebut, mengingat ekspitasi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kehadiran fasilitas tersebut.

Dalam konteks ini, dapat difahami apa yang dimaksud oleh Gandhi terkait dengan kemajemukan, dimana perbedaan-perbedaan yang ada bisa hidup dengan damai apabila ada sikap toleransi, namun esensial toleransi ini masih dimaknai dengan cara keterpaksaan bukan atas dasar kesadaran, yang terlihat adalah secara factual damai namun secara psikologis mikro bergejolak, setidaknya dapat dilihat apa yang terjadi di ruang social media public yang berdiskusi penuh dengan kebencian-kebencian dan penolakan-penolakan. Damai di permukaan namun tidak damai di ruangan publik media social. Di ruagan itu saling hujat menghujat, saling tuding dan cacian-cacian.

Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang berkembang tentang pendirian rumah sakit Siloam di Padang dimana sampai saat ini masih saja menjadi diskusi di ruangan publik media social dengan isu-isu kritisasi. Diskusi tersebut bisa dilihat dengan terbuka oleh semua orang yang mengkasusnya. Keterbukaan di ruangan publik melalui kebebasan di media social, ternyata sebagai sarana akses untuk bisa damai di dunia realitas, karena dari segi psikologis diskusi di dunia maya membangun keterbebasan psikologis

orang bebas komentar setelah bebas lupa aksi dan tindakan kekerasan di realitas.

Kemudian diskusi itu juga membuat pihak-pihak minoritas dapat bersikap hati-hati dalam bertindak dan bersikap terhadap kondisi mayoritas. Ada sikap memaknai kehendak dominasi, sehingga secara temporer bisa menghentikannya seperti kasus pendirian rumah sakit Siloam, dengan besarnya tekanan di ruangan publik social media akhirnya bisa dilakukuan berhati-hatian sehingga dihentikan kegiatan pendirian tersebut.

KESIMPULAN

Intoleransi beragama di Sumatera Barat pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh penilakan-penolakan fasilitas yang akan dibangun oleh investor yang berbeda agama dengan mayoritas agama masyarakat. Pada masa ini sudah isu-isu agama sudah dibangun oleh masyarakat, dimana masyarakat tidak mudah menerima agama Islam yang baru saja dikembangkan oleh pedangang Arab yang terdampar itu. Pada saat itu agama Budha dan Hindu masih kuat dan mayoritas dipraktekkan oleh masyarakat setempat. Isu agama biasanya menyebabkan ada yang terusik oleh aktivitas dan kegiaitan yang dilakukan oleh masing-masing agama, baik yang dilakukan oleh kelompok minoritas maupun oleh kelompok mayoritas.

Di Sumatera Barat Isu-isu keagamaan itu berkembang tiga tahun ini adalah isu anantara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas Nasrani (Kristen Khatolik-Protestan), isus-isunya terkait dengan murtad, penyebaran agama, pendirian fasilitas. Pada tahun 2013 dua isu itu menjadi perhatian khusus dan paling banyak mendapat respon masyarakat dan dilakukan dengan penolakan demonstrasi oleh kalangan masyarakat yang bergabung dengan elemen-elemen dan ormas-ormasi Islam. Sedangkan dilain pihak ada keberadaan-keberadaan lain tidak mendapat perhatian penolakan.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Amin, “Perspektif Analitis dalam Studi Keragaman Agama. Mencari Bentuk Baru Metode Studi Agama. Harmoni Kehidupan Beragama Problem dan Praktik Pendidikan. Yogyakarta: Oasis Publisher, 2004.
- Al-Amin, Imam Maulana Abdul Munaf, *Mubalighul Islam*, Padang: Bagian Urusan Kebudayaan Sumatera Barat, 1883.
- BPS Sumatera Barat. 2012. Data Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten dan Kota.
- Djokosurjo, dkk., *Agama dan Perubahan Sosial, Studi Antara Hubungan Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*, Yogyakarta: LPKSM, 2001.
- Goddard, Hugh, *Enam Dimensi Hubungan Islam Kristens, Harmoni Kehidupan Beragama Problem dan Praktik Pendidikan*, Yogyakarta: Oasis Publisher, 2004.
- Hantington P. S., *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam, 2000.
- Hanani, Silfia, *Menggali Interelasi Sosiologi dengan Agama*, Bandung: Humaniora, 2012.
- Hanani, Silfia. “Model Konstruksi Toleransi Antar Umat Beragama Pemeluk Agama Mayoritas dan Minoritas Pada Masyarakat Perkotaan Kota Padang Panjang Di Sumatera Barat”, *Renai*, Salatiga: Percik, 2011.
- Hardi, Andri. “Interfaith dialogue Dalam Konteks Hubungan Internasional”, *Tabloid Diploma*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2010.
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial dari Kalsik Hingga Postmodern*, Yogyakarta: Arruz, 2012.
- Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*, Jakarta, 2010.
- Muhaemin, Enjang, and Irfan Sanusi, "Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.1, 2019.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Padang Ekspres, 27 Maret 2013. “Kab. 50 Kota 117 Wanita Hamil di Luar Nikah”
- Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Ritzer, G. & Goodman, J. D., *Modern Sociological Theory*, USA: McGraw-Hill, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alabeta, 2010.
- Suseno, Franz Magnus, “Interfaith Dialogue Jendela Untuk Menampakkan Keberhasilan Indonesia Dalam membangun Kerukunan dan Toleransi”, *Tabloid Diploma*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2010
- _____, “Kerukunan Agama dalam Keberagaman Agama Kasus di Indonesia”, *Harmoni Kehidupan Beragama Problem dan Praktik Pendidikan*, Yogyakarta: Oasis Publisher, 2004.
- Titaley, Jhon., “Beberapa Model Keragaman di Asia: Keunikan Kehidupan Beragama di Indonesia”, *Harmoni Kehidupan Beragama Problem dan Praktik Pendidikan*, Yogyakarta: Oasis Publisher, 2004.

- Toha, Soherman, dkk., *Laporan Hasil Penelitian Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Menyelesaikan Konflik Antar dan Intern Agama*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.
- New Tribun, Survei Elsam Kebebasan Beragama di Sumatera Barat terburuk. 4 Juni 2013.
- Ting-Toomey, Stella, *Communicating Across Culture*, New York: The Guildford Press, 1999.